

**Catatan Pertemuan
Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI IX
Jakarta, 28 Juni 2013**

I. Pembukaan

1.1. Sambutan Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, Caroline Tupamahu

- Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) dibentuk pada tahun 2004 untuk mengembangkan kemitraan para pihak dalam menjawab tantangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Forum ini berupaya mendukung tercapainya efektivitas dan keberlanjutan pembangunan yang bertumpu pada pembangunan yang berbasis pengetahuan dan kerja sama antar pihak.
- Anggota Forum KTI berasal dari kalangan pemerintah, akademisi, organisasi non pemerintah dan sektor swasta. Mereka adalah pembaharu sosial di bidang masing-masing yang senantiasa membangun relasi antar pihak dan antar daerah untuk membangun kemitraan dan inovasi sosial untuk membangun Kawasan Timur Indonesia yang lebih baik.
- Forum KTI memiliki dua sub jaringan untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif di Kawasan Timur Indonesia yaitu Jaringan Peneliti KTI (JiKTI) dan Forum Kepala Bappeda provinsi se-KTI. JiKTI merupakan jaringan yang beranggotakan para peneliti dari Kawasan Timur Indonesia dan berfungsi untuk mendorong upaya-upaya kolaboratif di antara para peneliti di KTI untuk mengisi kebutuhan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar bertumpu pada hasil-hasil penelitian. Forum Kepala Bappeda terdiri atas Kepala Bappeda Provinsi dari dua belas provinsi di KTI dan berfokus pada usaha peningkatan koordinasi pembangunan antar-pemerintah provinsi juga antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta untuk berbagi praktik cerdas dalam bidang perencanaan pembangunan. Pada hari ini hadir juga koordinator JiKTI dan perwakilan focal point JiKTI.
- Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Yayasan BaKTI) resmi beroperasi sebagai Yayasan pada tahun 2010. Selain memfasilitasi pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di KTI, salah satu fungsi utama Yayasan BaKTI adalah menjadi sekretariat Forum Kawasan Timur Indonesia termasuk Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI dan Jaringan Peneliti KTI (JiKTI).
- Sebagai satu-satunya lembaga yang memfokuskan diri pada pengelolaan pengetahuan pembangunan di KTI, Yayasan BaKTI melihat pentingnya peran ini untuk dikembangkan secara lebih mandiri, profesional dan berkelanjutan. BaKTI akan berkiprah secara lebih efektif dalam menjawab tantangan kesenjangan akses informasi dan pertukaran pengetahuan yang diyakini sebagai salah satu tantangan pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Langkah ke sana dilakukan dengan memperluas jaringan kerja BaKTI hingga ke level kabupaten, mempererat kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah serta media untuk penyebarluasan cerita-cerita keberhasilan pembangunan di KTI, serta secara aktif melakukan identifikasi praktik-praktik cerdas baru dari KTI dan mendorong replikasi/adopsi.

- Sejak Pertemuan Forum KTI yang keempat pada tahun 2009 di Makassar, kami menampilkan berbagai Praktik Cerdas yang ada di Kawasan Timur Indonesia. Ide besarnya adalah untuk mengubah cara pandang kita terhadap Kawasan Timur Indonesia. Sudah waktunya mengubah pandangan lama bahwa KTI terbelakang dan miskin, karena dalam perjalanan kami bekerja, kami menemukan banyak sekali inovasi dan praktik cerdas dari masyarakat KTI yang pantang menyerah. Hanya saja inovasi dan praktik cerdas ini belum banyak didokumentasikan, diketahui, dan dipublikasikan secara luas oleh berbagai media yang ada. Disinilah BaKTI berperan agar praktik-praktik cerdas ini dapat diketahui dan dapat direplikasi tentunya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.
- Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI IX ini mendapat dukungan dari Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi (AIPD) dan CIDA. Kami mengucapkan terima kasih kepada AIPD dan CIDA. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Bappenas yang selalu memberi dukungan pada Forum ini.
- Hari ini Ibu/Bapak kepala Bappeda provinsi se-KTI mendapat kesempatan yang sangat baik yaitu memberikan masukan pada proses teknokratis penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan dan juga dapat mendengarkan hasil riset dari Public Expenditures and Revenue Analysis (PERA) yang didanai oleh AIPD (Australia Indonesia Partnership for Decentralization) dan Kajian Sulawesi Development Diagnostic (SDD) terkait Pengembangan Infrastruktur dan Pertumbuhan Inklusif di Sulawesi yang didukung oleh Bank Dunia dan CIDA. Selain itu akan ditampilkan pula beberapa praktik cerdas seperti Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM) – praktik cerdas dari Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat; Rumah Tunggu: Kehamilan dan Kelahiran yang Lebih Aman di Maluku Tenggara Barat; Upaya Terpadu Memerangi Malaria di Halmahera Selatan.
- Mudah-mudahan kesempatan untuk memberi masukan pada RPJMN 2015-2019 dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan hasil kajian beserta praktik cerdas yang dipresentasikan dapat memperkaya proses teknokratis penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019 dan juga dapat berguna dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah Ibu/Bapak masing-masing. Kami berharap praktik-praktik cerdas yang ditampilkan hari ini dapat diadopsi oleh daerah Ibu/Bapak, tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

1.2. Sambutan Ketua Kelompok Kerja Forum KTI, Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS

- Terima kasih kepada Bappenas atas dukungan yang tiada henti kepada Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI, terutama kepada Ibu Menteri Bappenas dan Bapak Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas.
- Salah satu target yang ingin dicapai dalam pertemuan ini adalah bagaimana Bappeda Provinsi Se-KTI dapat memberikan masukan terhadap penyusunan RPJM 2015-2019 khususnya buku III. Ada 3 hal yang menjadi fokus teman-teman Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI:

- 1) Program prioritas masing-masing provinsi dan program bersama antar provinsi dalam satu pulau, ada 4 pulau besar di KTI. Khususnya fokus pada pelayanan dasar masyarakat: pendidikan dan kesehatan serta program pengembangan ekonomi. Kita harus memasukkan kabupaten yang paling tertinggal. Data dari kementerian daerah tertinggal sudah ada. Contohnya di Gorontalo dari total 5 kabupaten, masih ada 3 kabupaten yang tertinggal. Hal ini perlu menjadi perhatian sehingga akan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara nasional.
- 2) Sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi. Bagian mana yang diintervensi oleh pemerintah pusat dan bagian mana yang akan diintervensi oleh Pemda sebagaimana yang diatur dalam PP No. 39 tentang kewenangan masing-masing pemerintahan. Ada 9 kewenangan pemerintah provinsi, 15 kewenangan pemerintah kabupaten/kota, dan 6 kewenangan pemerintah nasional. Ini yang harus dibahas dan dimasukkan dalam pembahasan untuk masukan RPJMN.
- 3) Perencanaan harus berkelanjutan dan harus tetap konsisten pada keunggulan masing-masing daerah yang berbasis pada komoditi unggulan masing-masing daerah. Seperti Gorontalo, masih fokus pada produksi jagung tapi ke arah peningkatan nilai tambah masih mengalami kesulitan karena adanya kendala infrastruktur. Ini nanti akan menjadi masukan dalam RPJMN Contoh: Sapi yang dikembangkan di Gorontalo dan Sulsel berasal dari Nusa Tenggara, perikanan tangkap disepakati berada di Maluku. Semuanya ini belum maksimal sehingga masih butuh dukungan dari Bappenas dan turunannya dukungan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pendidikan. Berdasarkan edaran dari Kementerian Pendidikan, 60% digunakan untuk pengembangan SMK dan 40% untuk sekolah umum. Sperlu banyak SMK-SMK berbasis komoditi unggulan. Bonus demografi akan habis terbagi 12 provinsi di Indonesia.

Ini adalah kebutuhan daerah, sehingga usulan dengan Kementerian akan sinkron dan akan dijemput oleh Bappenas dan Bappeda di Provinsi. Masukan ini juga sinergi dengan rencana tata ruang provinsi, pulau, kabupaten/kota. Setelah pertemuan ini, kami akan memfasilitasi pertemuan kecil antar kepala Bappeda untuk merumuskan/penyusunan RPJMN.

1.3. Sambutan Ibu Menteri Bappenas RI diwakili oleh Bapak Max Pohan (Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah)

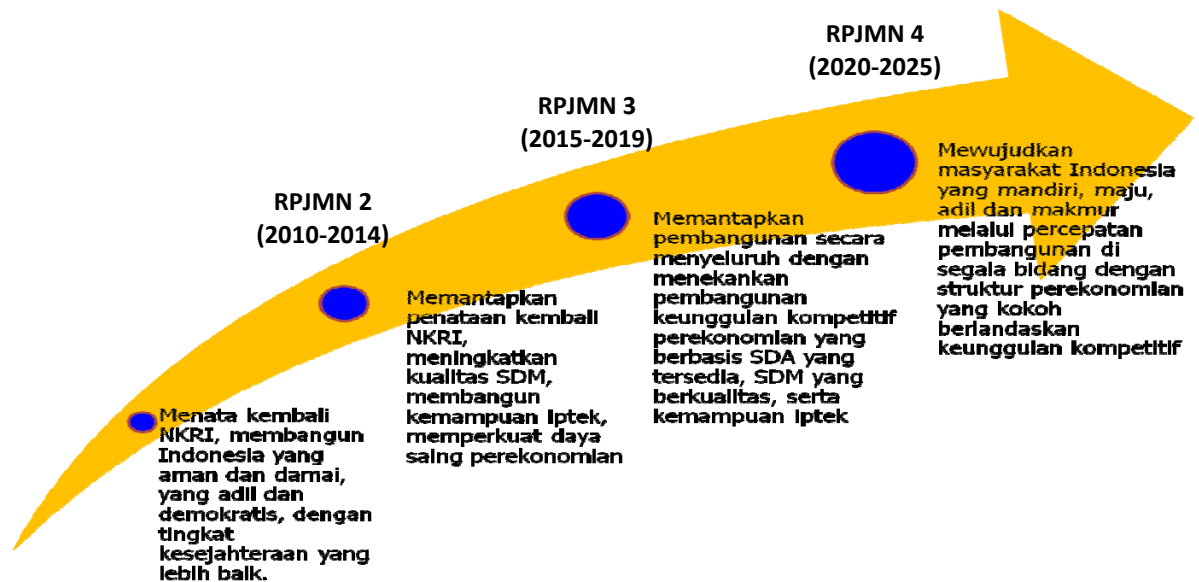
- Terimakasih atas undangan dari Forum KTI karena Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI ini dianggap penting oleh Bappenas karena semua upaya yang dilakukan adalah untuk mendukung kerja Bappenas.
- Forum ini diharapkan lebih banyak membicarakan mengenai proses teknokratik penyiapan rancangan RPJMN 2014-2019.
- Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah meningkatkan daya saing nasional menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Pasar Tunggal ASEAN) 2015 dengan meningkatkan daya saing daerah. Selain itu perlunya pemerataan pembangunan dengan menjaga momentum pertumbuhan dan memperbaiki distribusi pembangunan.

- Terkait RPJMN, Bappenas saat ini sedang menyiapkan rancangan RPJMN 2014-2019 dan sedang melakukan beberapa kajian akademik (background study). Perlu masukan dari daerah untuk aspek-aspek yang masih lemah/kurang, isu-isu strategis daerah yang diperkirakan dominan 5 tahun yang akan datang.
- Bagaimana RPJMN terkait dengan visi dan misi presiden yang terpilih. Ada dua kemungkinan presiden terpilih mempengaruhi teknokrat atau kita yang sejak awal mempengaruhi kandidat presiden ini. Memang ini menjadi kekhawatiran kita dan semoga saja visi misi calon presiden searah dengan RPJP.
- Bappenas sangat mengharapkan masukan dari provinsi dan provinsilah menjadi pusat penyusunan blue print pembangunan secara lengkap di provinsi bersangkutan dimana nanti ada elemen yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah nasional didalamnya dan ada elemen tugas dan tanggung jawab pemerintah kab/kota didalamnya. Bappenas juga membutuhkan masukan dari daerah, terutama mengenai hal-hal yang masing kurang dalam RPJMN dan issue strategis daerah apa yang perlu ditonjolkan dalam 5 tahun ke depan. Silahkan dimulai dalam forum-forum rembuk di daerah masing-masing dan tentu saja pada akhirnya Bappeda yang mengkompilasi semuanya.
- Daya saing bersumber dari faktor input (endowment), efisiensi, diferensiasi dan inovasi. Daya saing nasional dibentuk oleh daya saing antar daerah dan sinergi (keterkaitan) antar daerah. Kita beranjak meninggalkan keunggulan komparatif (daya saing berbasis input) menuju ke keunggulan kompetitif (daya saing berbasis efisiensi dan inovasi).
- Selain itu, terdapat elemen yang penting yakni aset dan sumber daya apa saja yang sudah dimiliki oleh masing-masing daerah untuk meningkatkan daya saing. Selain itu keunikan/spesifikasi dan keunggulan yang bisa dihubungkan dengan yang lain. Perlunya sinergi antar daerah, ada berbagai macam upaya yang sudah dilakukan yakni dengan koridor-koridor sebagai upaya untuk mewujudkan keterkaitan antar daerah. Harusnya kita lebih fokus pada penguatan SDM dan teknologi yang berarah pada daya saing dan inovasi.
- Isu lain adalah pemerataan, sudah banyak diwacanakan akan tetapi prosesnya masih tertatih-tatih. Peran wilayah Sulawesi dalam perekonomian nasional cenderung meningkat meskipun peran Nusa Tenggara, Maluku dan Papua cenderung stagnan. Dari sisi nasional, perlu ada affirmative policies. Tentu kita juga perlu melihat kemungkinan-kemungkinan lain, tanpa harus selalu menunggu APBN.
- Fokus kita pada pengembangan KTI ke depan adalah
 - o Peningkatan infrastruktur wilayah
 - o Investasi sumber daya manusia
 - o Diferensiasi produk melalui penguatan produk lokal yang memiliki keunikan tinggi
 - o Perbaikan kualitas kelembagaan
 - o Regions' branding & marketing
Perlu ada branding seperti Gorontalo dengan Jagung, NTB dengan PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut)
 - o Kerjasama antardaerah

- Perbaikan struktur spasial ekonomi nasional akan meningkatkan prospek pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah perlu bekerjasama untuk meningkatkan efektifitas peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia
- Skenario yang paling *workable* bagi pengembangan KTI adalah pengembangan industri berbasis keunggulan komparatif wilayah dan secara bertahap melakukan transformasi faktor *endowments* untuk mendukung transformasi menuju industri bernilai tambah tinggi.

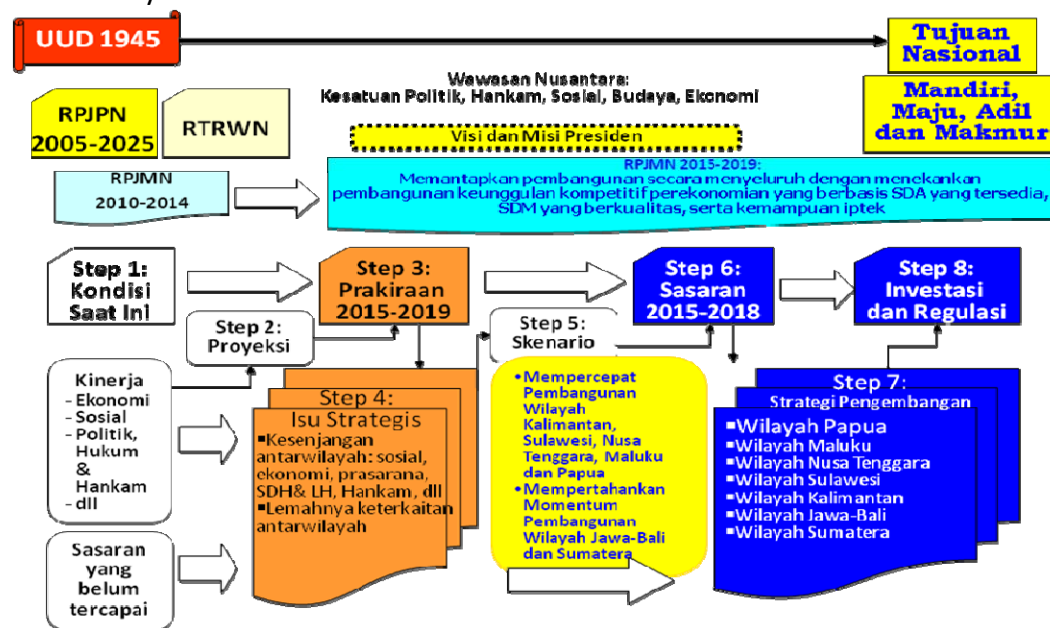
II. Paparan Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas - “Proses Teknokratis Penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan”

- Sejak tahun 2005, kita memperjuangkan buku III yang berdimensi kewilayahan. Buku I berbicara mengenai prioritas nasional dan Buku II menyampaikan secara lengkap rencana pembangunan secara sektoral.
- Tingkat heterogenitas bangsa Indonesia sangat tinggi dalam variabel apapun dan ini membuat segala sesuatu menjadi kompleks. Ini tidak menjadi masalah bahkan menjadi aset jika dikelola dengan baik dan banyak faktor yang berperan didalamnya seperti pendidikan, kesehatan, hukum dan sebagainya. Dan kita akan menjadi bangsa yang sangat kuat apabila kita mengelola dengan baik secara bersama-sama dan ini menjadi dasar lahirnya buku III.
- Buku III ini tidak sekedar mentranslasikan hal-hal yang ada dalam Buku I & II secara geografis, tetapi mengurai pemerataan menjadi misi di Buku III. Buku III dalam proses penyusunannya bisa lebih interaktif, bisa kewilayahannya dulu dan kemudian mempengaruhi pengisian buku II dan disini peran kita dalam mendorong pembangunan di KTI.
- **Proses Perencanaan**
 - o Proses Politik : Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan Presiden / Kepala Daerah terpilih selama kampanye.
 - o Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan
 - o Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (*stake holders*) ◇ Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang
 - o Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan
- Yang paling penting proses teknokratik dimana kita menyusun rancangan secara profesional oleh Bappeda dan Bappenas dan melibatkan semua pihak (bottom up).
- Visi RPJPN 2005-2025: Indonesia Yang Maju, Mandiri Dan Adil

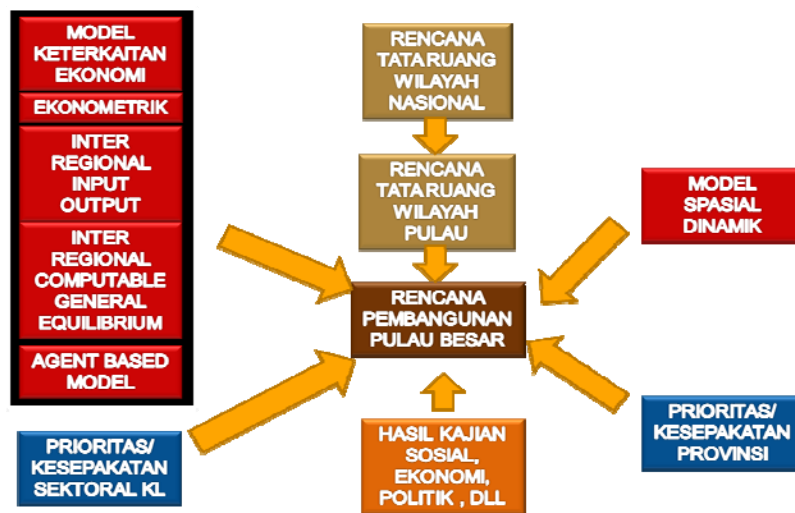


- Bagaimana ke depan, Visi RPJPN sampai 2025 tidak putus-putus karena terkait dengan koridor yang harus dijaga (*building bridge*). Setelah reformasi kita membangun kembali Indonesia kemudian kita memantapkan pembangunan NKRI secara menyeluruh.
- Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan pembangunan keunggulan kompetitif berbasis pada SDA dan SDM dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang penting bagaimana produktifitas wilayah dapat meningkat.
- **Terkait kinerja pembangunan wilayah**, Sumatera menyumbang hampir 24 % terhadap pertumbuhan ekonomi, Jawa hampir 60%, Nusa Tenggara 1,26%, Sulawesi hampir 5%, Kalimantan 9,3% dan Maluku Cuma 0,27%, data tahun 2012. Secara nasional pertumbuhan ekonomi 6,23% dan penduduk yang miskin 12%, pengangguran terbuka 6,8% dari Angkatan Kerja yang ada. Ada banyak ketimpangan dan kesenjangan yang harus kita kejar dan menjadi tantangan bersama, dan dapat dilakukan dengan menerapkan SPM secara menyeluruh.
- **Tantangan dan peluang 2015-2025:**
 - o Bagaimana mengakselerasi pembangunan wilayah melalui:
 - Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru - Percepatan Pembangunan KTI dan pembangunan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal
 - MP3EI: Konektivitas antarwilayah dan Pembangunan Infrastruktur (Sistem transportasi nasional: darat, laut dan udara, Sistem Logistik Nasional dan Sistem Informasi nasional)
 - Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Berbasis Pengetahuan: Pengembangan Keunggulan Berbasis Seni dan Budaya, dan Sumber daya Lokal, MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), Penerapan Manajemen Modern, dan IPTEK terkini
 - o “Beyond” Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015:

- ASEAN Connectivity 2015 bagaimana memperluas produksi, kemampuan jasa, perluasan pasar dan potensi wisata menjadi salah satu sektor yang akan terus ditingkatkan, serta perluasan jaringan sosial budaya terkait komunitas ASEAN.
- ASEAN OPEN SKY 2015, perlu perluasan jasa penerbangan (kuantitas dan kualitas), pengembangan *AEROTOURISM* melalui Aero Wisata, dan Pembangunan Wilayah melalui persaingan dan kerjasama.
- o “Nasionalisme” Wawasan Nusantara: Kesatuan wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, geografis, pertahanan dan keamanan.
- **Kerangka pikir RPJMN** yang berdimensi kewilayahan, ada 3 orientasi kebijakan yakni:
 1. Orientasi pembangunan wilayah (*growth center approach, interregional linkages, sustainable development approach*)
 2. Orientasi pembangunan manusia
 3. Orientasi pertumbuhan dan pemerataan
- Kerangka Pikir Penyusunan RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan



- Dalam RPJMN yang lalu, bagaimana sinergi rencana pembangunan dan rencana spasial dapat dilakukan dalam buku III. Upaya untuk mendorong akselerasi pemerataan itu pada akhirnya akan diformulasikan dalam buku III. Bagaimana kita mempengaruhi sektor dalam upaya mengurangi disparitas dan mempercepat pembangunan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan sekaligus mempertahankan momentum pembangunan di Jawa dan Sumatera. Daerah-daerah yang sudah efisien dalam arti daerah yang sudah maju infrastrukturnya akan mudah bagi investasi untuk menanamkan modal. Kemudian daerah yang belum maju, perlu didorong pembangunannya seperti infrastruktur.
- Metodologi penyusunan rencana pembangunan berdimensi kewilayahan



- Padukan dana dari dekonsentrasi, dana perimbangan, dana bantuan dari swasta, PPP, mitra pembangunan internasional. Perlu ada optimalisasi seluruh kemungkinan pendanaan. Alokasi anggaran berdasarkan sektor dan wilayah. Dalam 5 tahun ini, strategi yang akan dilakukan, harapan, target dan investasi yang dilakukan sudah harus bisa dibuat dari sekarang.
- Matriks Arah dan Prioritas Pengembangan Wilayah 2015-2019

Strategi dan Arah Pengembangan Wilayah	Prioritas Pengembangan Provinsi	Target					Investasi				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019

- Harapan kepada Bappeda Provinsi Se-KTI, bagaimana Bappeda Provinsi bisa difasilitasi oleh Forum KTI/Yayasan BaKTI untuk:
 1. Membantu ketersediaan data-data terkini (statistik dan spasial) sebagai basis penyusunan kebijakan dan program di masing-masing wilayah
 2. Merumuskan isu-isu strategis yang penting menurut daerah (keepakatan antarprovinsi dalam satu pulau dan masing-masing provinsi)
 3. Memfasilitasi dan berpartisipasi aktif dalam lokakarya regional di masing-masing pulau maupun lokakarya nasional untuk perumusan hasil *background study*.
 4. Mengintegrasikan dengan RPJMD (bagi provinsi yang dalam proses penyusunan)
- Yang terakhir, tetaplah dengan semangat dan spirit yang tinggi, terima kasih teman-teman KTI.

III. Tanggapan dan Diskusi

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo

Untuk Kawasan Timur Indonesia sehubungan dengan ASEAN Connectivity 2015, kesiapan kita masih terbatas terutama SDM yang masih lemah dan infrastruktur yang tidak siap. Kecuali jika ada kebijakan nasional yang memihak pada KTI yang didukung dalam aturan yang memprioritaskan pembangunan KTI. Yang pertama Bappeda seluruh Indonesia menyepakati untuk pembangunan infrastruktur di Jawa diserahkan kepada swasta karena Jawa sudah mandiri, sedangkan infrastruktur APBN alihkan saja untuk KTI, itu kesepakatan kami dari Bappeda pada pertemuan beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, sebagian besar wilayah KTI itu adalah laut (80%). Kebijakan kita kurang memihak pada periode sebelumnya, seharusnya kita mengarah pada pengembangan kelautan (*blue economy*). Untuk *blue economy* sebenarnya sederhana saja yaitu pembangunan infrastruktur, lalu kebijakan sebelumnya dimana ekspor impor yang hanya melalui pulau Jawa dan fokus pada hub-hub tertentu, dialihkan pada pembukaan semua keran-keran di KTI serta perbaikan kelembagaan seperti kesiapan kerja sama syahbandar, bea cukai dan imigrasi, supaya ego institusi dan sektoral bisa dikurangi. Yang ketiga adalah HUB jangan dibatasi, misalnya semua harus lewat Sulut, biaya akan menjadi sangat tinggi. Pembangunannya juga jangan terkonsentrasi, bagaimana HUB bisa tumbuh jika hinterlandnya tidak tumbuh.

Kepala Bappeda Provinsi Papua

Papua memiliki keunikan yaitu selama ini ada *image* dengan adanya OTSUS banyak uang di Papua. Tapi sebenarnya, hitungan terakhir itu adalah Rp 38,3 Trilyun hingga di tahun ke 11, dibandingkan dengan DKI satu tahun Rp 38 Trilyun. Jadi artinya *image* ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa uang banyak di Papua, tetapi kenapa IPMnya paling rendah dan tetap menjadi daerah termiskin di Indonesia. Isu yang sangat mendasar yaitu persoalan nasionalisme-wawasan kebangsaan, persoalan kepercayaan yang mengarah pada aspek politik itu lebih dominan daripada aspek pembangunan. Dana Bupati dan Walikota lebih banyak terserap kepada hal-hal penyelesaian perang suku dan lain-lain daripada mengarah pada pembangunan yang produktif. Apakah mungkin dibutuhkan cost khusus untuk aspek-aspek politik ini sehingga tidak mengganggu dana pembangunan.

Yang kedua, kalau dibandingkan dengan provinsi lain, Papua baru menjalankan sistem pemerintahan dan pembangunan yaitu pada tahun 1969, daerah yang lain mulai tahun 1945 dan 1966. Jadi Papua butuh percepatan-percepatan, tidak bisa sama dengan daerah lain. Yang paling mendasar adalah beberapa kebijakan nasional perlu ada sedikit pertimbangan untuk memperhatikan kondisi lokal. Misalnya kita punya dana Pansus, tetapi harus berdasarkan pada Permendagri 13, sehingga ini menyulitkan fleksibilitas percepatan pembangunan. Ada beberapa Perpres yang sudah dikeluarkan terkait pengadaan barang dan jasa No 82 tahun 2012 yaitu tanpa tender sampai 1 Milyar di wilayah pegunungan, ini kebijakan yang sangat membantu. Sekarang Gubernur yg baru menekankan pada aspek pembangunan ekonomi dimana sebelumnya hanya pada aspek sosial. Banyak yang mengembangkan ekonomi di Papua berasal dari Jakarta, sehingga terjadi *capital flight* (banyak uang yang masuk ke Papua terbang lagi kembali ke Jakarta). Sekarang seperti

Freeport, kantor pusatnya di Jakarta, operasinya di Papua. Pajaknya jatuh ke DKI, karena kantor dan karyawan terdaftar di DKI, jadi sebenarnya Papua mensuplai dana ke DKI. Maka perlu ada kebijakan lebih berpihak pada Papua. Kebijakan yang dimaksud adalah untuk perusahaan yang beroperasi di Papua, maka seharusnya kantor pusat dan semua pegawainya juga harus terdaftar di Papua. Jadi 3 hal yang penting yakni dana khusus untuk menyelesaikan aspek politik, butuh amunisi yang lebih dan kebijakan yang berpihak atau *affirmative action*.

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

Memang menarik sekali bahwa disparitas yang digambarkan tadi itu harus ada keberpihakan supaya Indonesia bisa merata. Persoalan yang mengemuka, ada 3 masalah, ekonomi growth kita yang belum optimal, adanya disparitas antara wilayah yang satu dengan yang lain, kemudian kesenjangan pembangunan antara wilayah dan lambannya perbaikan kesejahteraan karena kurangnya infrastruktur. Persoalannya, bagaimana melakukan keberpihakan, secara alamiah kita tidak bisa melakukan itu, harus ada usaha yang lebih dari wilayah di luar Jawa untuk mengejar pembangunan Jawa. Saya tidak berbicara dari sudut pandang provinsi, tapi secara kepulauan yaitu Pulau Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia karena hari ini kita berkumpul sebagai satu kawasan untuk kepentingan nasional.

Dari segi pengembangan Pulau Sulawesi, kita butuh percepatan transportasi yaitu kereta api dari utara ke selatan atau selatan ke utara. Selain itu, HUB juga perlu dibuka secara bebas, semakin banyak pintu untuk ekspor semakin baik, dengan membuka semua pintu agar kegiatan ekspor-impor dapat berjalan lancar. Inilah salah satu bentuk kebijakan untuk mengurangi kesenjangan. Kami juga melihat perlunya kebijakan pusat berpihak ke energi. Jika kita lihat MP3EI koridor Sulawesi dan Maluku sampai ke Timur, jika dihitung daya listriknya tidak sampai 2500 MW sementara dari mereka diharapkan share yang besar untuk membuka industri pertambangan nasional, paling tidak 2 Koridor ini harus memiliki listrik 7000 MW. Jika ini menjadi keberpihakan, maka peranan 2 koridor ini dapat mengurangi kesenjangan. Selain itu, kita melihat dalam penguatan KTI, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dimana Papua sebagai food basket dan pusat agribisnis, ini menjadi harapan besar dimana penduduk dunia sudah 7 Milyar. Hal ini akan mengangkat KTI sebagai kawasan yang mendorong pengurangan disparitas. Yang terakhir, Bappeda Sulsel saat ini sedang menyusun RPJMD dan juga dalam proses teknokratik mengumpulkan issue dan melibatkan berbagai stakeholder. Kami sangat mengharapkan dukungan Bappenas dalam hal ini.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku

Maluku sebagai provinsi kepulauan dimana sebagian besar terdiri dari 72,4% laut dan daratnya 76 %, jadi skenario pembangunan Maluku harus berbasis kepulauan, berbeda dengan daerah kontinental. Isu strategis di Maluku terutama terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur, terutama perhubungan baik dalam maupun antar pulau sehingga biaya logistik mahal dan menyebabkan daya saing provinsi Maluku yang lemah. Energi dan komunikasi juga terbatas hanya ada di ibukota kabupaten, belum di kecamatan maupun di pulau kecil. Tingkat kemiskinan di Maluku mencapai 20,76% sekitar 300.000 rakyat Maluku

yang masih miskin. Strategi pembangunan yang kami usulkan untuk Maluku adalah, di Maluku ada 4 sektor unggulan yakni Perikanan, Pariwisata, Perkebunan dan Pertambangan. Pertambangan MIGAS terbesar di Masewa, perikanan tangkap dan budidaya rumput laut, contohnya rumput laut pemasarannya masih sulit. Ke depan perlu ada industri pengolahan untuk perikanan dan perkebunan. Perlu adanya industri-industri yang menciptakan lapangan kerja. Karena keterbatasan transportasi, kami mempunyai konsep trans Maluku, ada 12 gugus menghubungkan gugus pulau 1 di Pulau Buru menuju Maluku Utara maupun Sulawesi, dan selatan Gugus 12 di Pulau Wetar dengan pintu keluarnya ke NTT. Sehingga trans Maluku merupakan ruas arteri yaitu gabungan jalan dan ferry/intermoda. Apabila trans Maluku sudah terbuka bisa meningkatkan perekonomian Maluku. Saat ini sudah terbuka 65% dan itu adalah jalan nasional, yang belum terbuka sebagian besar statusnya adalah jalan provinsi/kabupaten. Salah satu usul kami, untuk jalan provinsi di Maluku DAKnya dapat ditingkatkan, saat ini DAK Maluku untuk jalan provinsi masih Rp 19 miliar. Kalo dilihat balai jalan Rp 1 triliun lebih, kalau jalan provinsi totalnya hanya Rp 65 miliar.

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat

Aspek infrastruktur dan SDM menjadi persoalan. Dalam MP3EI sudah ada koridor dan ada penugasan yang diberikan kepada setiap pulau. Bagaimana kalau bisa diintegrasikan dengan penyediaan SDM yang memiliki skill berlimpah di Jawa untuk ditempatkan pada pusat-pusat konektivitas di pulau-pulau di KTI yang akan memberikan produktivitas dan efektivitas. SDM Kita di Timur masih sangat sedikit dengan populasi yang masih sedikit seperti di Papua. Bappenas sebagai badan koordinator bisa mengkoordinasikan KL-KL untuk melakukan hal ini.

Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kami mengusulkan sederhana saja agar diakhir program RPJMN 2010-2014 ini, pada tahun anggaran 2014 Bappenas mengusulkan agar 12 provinsi di KTI memperoleh Rp 12 Triliun (masing-masing provinsi Rp 1 Triliun) untuk DAK dan DAU.

Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Momentum strategis penyiapan RPJMN 2015-2019 terutama Buku III bukan hanya menjadi ajang pengusulan isu, mari kita mengusulkan secara utuh apa yang menjadi kebutuhan daerah kita kolaborasi kemudian kita diskusikan dalam workshop/forum yang intensif difasilitasi oleh Forum KTI.

Tanggapan dari Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas

Forum ini bukan Musrenbang, tetapi bagaimana kita merapatkan barisan dalam menyusun strategi, *approach* dan metodologi penyusunan RPJMN 2015-2019 khususnya Buku III. Masukan semua kami catat. Apa yang disampaikan tadi merupakan isu strategis dan usul Pak Wayan (NTT) untuk melaksanakan pertemuan khusus membahas masukan RPJMN 2015-19 sangat bagus untuk dilakukan. Mulai dari isu penting, *approach*nya seperti apa dan KTI sebagai kesatuan wilayah secara utuh dan dalam bingkai NKRI. Silahkan teman-teman berdiskusi akan dilaksanakan kapan dan dimana. Kami sangat mengapresiasi masukan dari teman-teman dan harapannya bisa didiskusikan lebih mendalam nanti.

IV. Presentasi Praktik Cerdas

Rumah Tunggu: Kehamilan dan Kelahiran yang Lebih Aman di Maluku Tenggara Barat

Sebagai sebuah provinsi kepulauan, 90% wilayah Maluku adalah lautan dan yang terdiri dari 559 kepulauan. Dengan kondisi geografis seperti ini, masyarakat di kepulauan ini sangat mengandalkan transportasi laut sebagai penghubung utama dan bahkan satu-satunya bagi kebanyakan pulau kecil. Ditambah kondisi cuaca yang tidak menentu, akses untuk memenuhi pelayanan dasar publik, termasuk pelayanan kesehatan menjadi sebuah tantangan besar.

Mempertimbangkan berbagai kondisi, pada tahun 2009, di Maluku Tenggara Barat (MTB), salah satu kabupaten di Maluku yang 88% wilayahnya adalah laut, dicetuskan konsep rumah tunggu sebagai solusi cerdas. Rumah tunggu merupakan rumah milik masyarakat yang ditetapkan sebagai tempat bagi ibu untuk menunggu persalinan. Layanan yang diberikan di rumah ini meliputi layanan persalinan, pemeriksaan laboratorium, imunisasi ibu dan bayi baru lahir, pemeriksaan ibu dan bayi pasca melahirkan, serta pemeriksaan antenatal.

“Rumah Tunggu dibuat untuk mengatasi persoalan “Tiga Terlambat”, yaitu terlambat untuk mengetahui persoalan, terlambat merujuk, dan terlambat penanganan. Tiga Terlambat inilah yang paling banyak menyebabkan ibu hamil meninggal dunia.” Ujar dr. Juliana Ratuanak.

Rumah yang dijadikan Rumah Tunggu adalah milik masyarakat, sehingga partisipatif aktif masyarakat menjadi kunci utama pelayanan yang diberikan. “Kekuatan sosialisasi dan mobilisasi Rumah Tunggu adalah pada pendekatan budaya, kekeluargaan dan agama.

Sejak adanya Rumah Tunggu, terjadi penurunan angka kejadian ibu meninggal saat melahirkan di Kab. MTB mulai dari tahun 2007 hingga 2012 dari 21 orang menjadi 3 orang. Demikian pula kematian bayi pada tahun 2007 mencapai 74 kasus menjadi 38 kasus di tahun 2012.

Upaya Terpadu Memerangi Malaria di Halmahera Selatan

Beberapa daerah di Indonesia Timur menjadi daerah endemik malaria, salah satunya adalah Halmahera Selatan di Maluku Utara. Tahun 2003 hingga 2007 Halmahera Selatan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) berturut-turut, dengan korban meninggal 205 orang. Ada 3 hal yang perlu dihilangkan : kuman dalam diri manusia, sementara saat ini kuman resistensi terhadap obat yang digunakan selama ini; kedua perilaku masyarakat, kebiasaan masyarakat yang menginap di kebun pada saat panen yang notabene mereka pasti terpapar dengan malaria. Kemudian dari segi ketidaktahuan masyarakat akan malaria, seperti genangan air dimana nyamuk meletakkan telur. Dalam konteks malaria, fungsi sel darah merah mengalirkan makanan ke seluruh tubuh, kemudian mengedarkan oksigen keseluruh tubuh sementara malaria menyerang sel darah merah. Wilayah malaria pasti adalah wilayah miskin, bukan hanya berpengaruh pada kesehatan tapi juga berpengaruh terhadap ekonomi, orang yang terkena malaria maka produktifitasnya akan menurun. Wilayah endemik Malaria terdapat di

Maluku, Papua dan Nusa Tenggara kurang lebih 90%. Kemiskinan yang dialami adalah kemiskinan internal karena masyarakat kita tidak mampu mengelola sumber daya di sekitar mereka. Maka dari itu, kami mencoba mengubah mindset masyarakat melalui fasilitator desa dengan metode PLA (Participatory Learning Action) yang kemudian dihimpun dalam lembaga koordinasi Malaria Center. Hingga saat ini di Maluku Utara, masih ada dua kabupaten yang belum ikut yaitu Morotai dan pulau Taliyabo.

Pada tahun 2003 lahir instruksi bahwa harus ada Malaria Center yang menghimpun semua lintas sektor yang terkait. Kemudian, dalam segi regulasi lahir PERDA tentang Malaria yang kemudian dibreakdown dengan adanya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif bahwa 5 % dari anggaran pengendalian malaria berasal dari Dinas Kesehatan dan ini sudah terwujud. Kami juga berafiliasi dengan pihak Bank Indonesia, Aneka Tambang dan PNPM Mandiri untuk mendukung pencapaian MDGs. Sekarang tinggal 11 orang yang positif per 1000 penduduk dan sejak tahun 2008 tidak terjadi lagi KLB di Maluku Utara.

Malaria bukan hanya masalah bagi orang-orang yang bekerja di kesehatan tapi masalah kita bersama. Ada deklarasi bersama lintas sektor di Halmahera Selatan bahwa Malaria adalah masalah kita bersama dan mari kita hadapi bersama yang kami sebut **Gebrak Malaria** dengan 3 pola pelayanan yakni: pelayanan kesehatan, kemitraan dan pembinaan masyarakat. Dengan menggunakan alokasi dana desa, masyarakat menimbun tempat-tempat nyamuk bekerjasama dengan PMD, kemitraan lintas sektor dengan PU, Perikanan mereka memberikan ikan pemakan jentik yang kemudian kami taruh di tempat genangan air yang cukup besar, kemudian tahun ini ada spesifik grant sekitar 15 juta per desa di Halmahera. Untuk mendukung ini semua, ada 3 hal yang kami lakukan yakni integrasi, pelatihan terhadap tenaga-tenaga dan puskesmas gugus pulau. Ketika ada dokter atau tenaga kesehatan yang baru datang, mereka harus diberi pembekalan terlebih dahulu, kemudian ada plasmodie untuk melayani setiap sore hari, yang melayani pasien dari dokter praktik yang tidak mempunyai mikroskopisnya. Kami lakukan ini dari pulau ke pulau, dari 300 pulau hanya 64 yang berpenghuni. Kami juga memiliki SMS Center, ketika terjadi peningkatan kasus maka kami menginformasikan ke masyarakat bahwa harus waspada, kemudian kemarin pada hari peringatan Hari Malaria sedunia, kami mengumpulkan 303 fasilitator desa disamping mereka melakukan sharing, kami juga melakukan seminar ekonomi dengan mendatangkan pencetus bank pohon, bank sampah, minyak asiri dan Bank Indonesia untuk mendorong produktifitas ekonomi lokal. Dan Insya Allah pada tanggal 16-18 Juli 2013 akan berlangsung seminar lintas sektor yang akan dihadiri oleh sektor swasta dan Bappeda Kab/Kota di Maluku Utara.

Dampak program ini, tahun 2003 jumlah kematian 205 turun menjadi 3 di tahun 2012, kemudian dari segi angka dari 33 per 1000 orang positif menjadi 11 orang per 1000 orang positif dan terjadi zero KLB. Bupati sendiri mengklaim bahwa ketika malaria menurun maka produktifitas meningkat.

Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM)- praktik cerdas dari Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat

SIPBM dilakukan di Kab. Polewali Mandar yang berjalan sejak tahun 2004 dengan pilot di 2 kecamatan dan pada tahun 2007 sudah dilakukan di 16 kecamatan secara bersama-sama. Setelah itu dilakukan evaluasi dampaknya besar dalam mengatasi masalah pendidikan.

Pertanyaan besar: Tahukah anda berapa jumlah anak yang tidak bersekolah minimal di sekitar rumah kita masing-masing? Kalau belum tahu, MENGAPA tidak tahu? Jawabannya pasti karena TIDAK ADA DATA. Mengapa tidak ada data? DATA DIANGGAP TIDAK PENTING. Kita sering memecahkan masalah dengan Perasaan dan Wangsit. Perencanaan yang buruk berbasis pada data yang tidak akurat. Perencanaan yang baik berbasis pada data yang akurat.

Apa itu Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM)? Prosedur pengumpulan data anak usia 0 - 18 tahun. Dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan untuk dimanfaatkan masyarakat dalam meretas persoalan pendidikan di daerahnya.

Lahirnya SIPBM dilatarbelakangi karena data pendidikan yang ada saat itu belum memadai, yakni data putus sekolah, lulus tidak lanjut dan buta huruf. Data yang dikumpulkan oleh dinas pendidikan sumbernya dari sekolah. Padahal data terkait dengan anak ada di masyarakat. Data yang ada belum menunjukkan: dimana mereka berada, berapa umurnya saat ini dan apa penyebab mereka tidak bersekolah. Tujuan dari pendataan ini adalah untuk menjadi bahan perencanaan pendidikan, khususnya Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun dan menjadi acuan pengelolaan data pendidikan secara periodik dari tingkat Desa sampai Kabupaten.

Informasi dasar SIPBM digunakan untuk mengetahui 1) Berapa banyak anak usia dini yang akan mengikuti program PAUD, 2) Berapa banyak anak usia sekolah (7-18 thn) yang tidak bersekolah (putus sekolah, belum pernah sekolah, lulus tapi tidak lanjut), 3) Di mana anak yang tidak bersekolah, 4) Mengapa tidak bersekolah, 5) Program apa yang diperlukan untuk membawa anak kembali bersekolah?

Manfaat bagi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pendataan menumbuhkan kesadaran akan adanya masalah dan kepedulian untuk mengatasinya (Rencana Aksi Desa), ada kesempatan untuk berkontribusi dalam proses perencanaan pendidikan, menggerakkan modal sosial yang dimiliki untuk ikut meretas solusi atas masalah pendidikan yang dihadapi.

Manfaat bagi pemerintah adalah perencanaan pendidikan jadi lebih tepat – bukan asal jadi, ada akuntabilitas dan akseptabilitas perencanaan pendidikan, menyediakan profil pendidikan pada berbagai jenjang administrasi pemerintahan, Mampu meredam gejolak sosial di tingkat masyarakat akibat data yang kurang tepat sasaran. SIPBM juga memenuhi target MDGs, SIPBM juga berkontribusi dalam peningkatan IPM karena ada dua data utama yang akan kita peroleh yakni data: buta aksara dan rata-rata lama sekolah.

Dari tahun 2004 – 2007 kita mengembangkan Sistem Informasi PENDIDIKAN Berbasis Masyarakat dan pada tahun 2008 kita mengembangkan Pemutakhiran Data KEMISKINAN Berbasis Masyarakat. Pada tahun 2013 ini, kami mengembangkan instrumen Sistem Informasi PEMBANGUNAN Berbasis Masyarakat. Sudah ada variabel kesehatan, kemiskinan, data kependudukan lainnya yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pada tahun 2013 di Sulbar akan dilakukan di 4 kabupaten dan khusus di Polman akan dilakukan sensus kembali terhadap instrumen yang baru ini.

SIPBM sudah direplikasi pada banyak kabupaten di Indonesia, di Sulawesi Selatan sudah direplikasi di Kab. Takalar dan Jeneponto didampingi langsung oleh tim SIPBM pada tahun 2006-2007. Kalau yang didampingi langsung oleh Kementerian Pendidikan Nasional, sudah ada 70 kabupaten di Indonesia. Sampai saat ini di Sulbar, Polman, Mamuju, Majene masih berjalan, Mamasa dan Mamuju Utara tahun ini akan mereplikasi. Di NTT ada 5 kabupaten yang akan replikasi: Sikka, Kota Kupang, Alor, TTS, Sumba Timur. Kota Ternate dan Halmahera, di Maluku Utara dan untuk kota Palu dalam rangka program Zero Poverty yang akan menerapkan SIPBM Pembangunan. Selain itu ada juga di KBI, yakni di Jawa Barat ada kabupaten Sukabumi, di Jawa Tengah: Klaten dan Brebes, di Aceh: Aceh Besar dan Aceh Timur.

Yang menarik juga ada kearifan lokal dan dukungan masyarakat yang muncul dimana melalui data SIPBM anak disekolahkan dengan dana dari amil zakat sampai ketingkat universitas. Ada beberapa desa yang sulit diakses, dan banyak anak yang tidak sekolah karena lokasi tempat tinggal mereka yang jauh dari sekolah, masyarakat kemudian berinisiatif membangun transportasi antar jemput anak sekolah. Dari data SIPBM, PNPM mengembangkan PPK pendidikan, memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang tidak mampu. Di beberapa desa ditemukan anak yang tidak bersekolah karena tidak ada TK, dengan data SIPBM maka dibangunlah sekolah di desa tersebut. Ada Buku Saku yang diberikan kepada setiap camat dan kepala desa, yang isinya mengenai data siswa yang tidak bersekolah. Ketika Menteri Pendidikan Nasional mencanangkan untuk menyekolahkan kembali anak putus sekolah, maka kami sudah terlebih dahulu melakukannya. Kami membangun posko-posko pengaduan di semua kantor kepala desa, sehingga tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Yang cukup fenomenal pada tahun 2012, kami berhasil menyekolahkan kembali 2316 anak baik sekolah formal maupun non formal. Ini membuktikan kalau kita memiliki data yang bagus maka pendekatan kebijakan juga akan bagus. Wakil Presiden juga melaunching program pengembalian anak ke sekolah sebagai program nasional dan inisiatif ini dimulai dari Timur.

Ada yang mengatakan Data itu Penting! Yang penting Ada Data! Data itu MAHAL. **Membangun tanpa data jauh lebih MAHAL! DATA mencerdaskan bangsa. SIPBM jaminan data akurat untuk perencanaan pembangunan**

V. Presentasi Hasil Riset

PUBLIC EXPENDITURE AND REVENUE ANALYSIS (PERA)

Apa itu PERA? Studi yang menganalisis bagaimana pemerintah daerah memobilisasi, mengalokasikan dan mengelola sumberdaya keuangan (APBD) dengan memperhatikan disiplin dan konsistensi perencanaan dan penganggaran untuk mencapai kinerja pembangunan daerah

Mengapa PERA?

- Pengukuran Kinerja pembangunan → self assesment
- Ownership ada pada Pemerintah Daerah, Penelitian (termasuk Peneliti) hanya inisiasi
- Perencanaan dan Penganggaran, sebagai suatu sistem yang kontinyu
- Keputusan kebijakan daerah berbasis evidence
- PERA, membangun fondasi Akuntabilitas

Urgensi “PERA” bagi Pemerintah Daerah

- Untuk mengetahui apakah peningkatan kapasitas fiskal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah berjalan paralel dengan perbaikan manajemen keuangan publik;
- Untuk memperoleh gambaran apakah pengelolaan keuangan daerah dan proses penganggaran telah bersesuaian dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat;
- Untuk mengetahui seberapa efisien dan efektif pengalokasian anggaran publik dan pengeluaran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik, mendorong perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- Untuk memastikan apakah kinerja pembangunan daerah telah mengalami kemajuan berarti dari tahun ke tahun.

Tujuan PERA

- Memperoleh gambaran kinerja sosial ekonomi masing-masing kabupaten di lima provinsi wilayah kerja PERA
- Memperoleh gambaran analisis tentang pengelolaan keuangan daerah (PFM) meliputi 3 aspek perencanaan dan penganggaran daerah, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan dan akuntabilitas anggaran
- Memperoleh gambaran tentang penerimaan (sumber-sumber pendapatan daerah dan rincian objek pendapatan daerah) dan belanja daerah (secara agregat, belanja sektor strategis), belanja daerah melalui APBN yang dikelola oleh instansi vertikal.
- Memperoleh gambaran isu-isu lokal termasuk isu kemiskinan, isu HIV /AIDs, mitigasi bencana, konservasi lingkungan hidup, dan isu gender.

Manfaat PERA

- Memberi informasi kepada pemerintah daerah dan legislatif terkait dengan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah (aspek penerimaan dan pengeluaran).
- Mengembangkan tradisi *evidence-based policy making* di daerah.
- Mengembangkan kapasitas akademisi lokal yang akan menjadi mitra Pemerintah Daerah.
- Meningkatkan pengetahuan legislatif dan CSOs mengenai keuangan daerah dan pelayanan publik di daerahnya.
- Lahirnya rekomendasi kebijakan yang nantinya menjadi dasar bagi AIPD untuk mendesain program, termasuk kebutuhan capacity building bagi pemerintah daerah
- Hasil studi PERA bisa ditindaklanjuti pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang diharapkan mampu menghasilkan alokasi anggaran yang lebih baik.

Ruang Lingkup Analisis

- Analisis pembangunan daerah: dimensi sosial ekonomi.
- Analisis pengelolaan keuangan daerah;
- Analisis keuangan daerah: pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Analisis sektor-sektor strategis: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dsb.
- Analisis isu-isu lokal: kemiskinan, gender, dll.

Wilayah Kajian PERA

Wilayah kajian PERA difokuskan pada satu pemerintah Provinsi yaitu: Papua Barat

20 kabupaten/kota yang tersebar pada lima Provinsi yaitu:

NTB: Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu

NTT: Kabupaten TTU, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Sumba Barat Daya

Papua: Kabupaten Merauke, Kabupaten Keerom, Kabupaten Peg. Bintang dan Kabupaten Supiori

Papua Barat: Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Manokwari

Jawa Timur: Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang

Gambaran Umum Hasil/Temuan Analisis PERA di Papua, Papua Barat, NTT, NTB:

- Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah yang dinilai relatif kurang baik dan terjadi hampir di seluruh kabupaten:
 - Kerangka peraturan dan perundangan
 - Akuntabilitas anggaran terutama audit eksternal

- Akuntansi dan pelaporan
- Sementara indikator yang dinilai relative lebih baik (mendapat poin tertinggi) pada seluruh kabupaten studi PERA adalah pengadaan barang dan jasa.
- Temuan Pengelolaan Keuangan Daerah di NTB (4 Kabupaten Studi)
Secara umum, penilaian yang dianggap lemah terkait pengelolaan keuangan adalah aspek kerangka peraturan dan perundangan (terendah Kab Lombok Utara) dan audit eksternal (4 kab)
- Pengelolaan Keuangan Daerah di 4 Kabupaten di NTT masih diperhadapkan pada lemahnya kerangka regulasi, eksternal audit, perencanaan dan penganggaran.
- Hasil analisis pendapatan daerah
 - Pendapatan daerah pada umumnya mengalami peningkatan selama periode 2007-2011, namun penyumbang terbesar adalah dana perimbangan rata-rata diatas dari 80 persen, sementara sumbangan PAD hanya berkisar 2-6 persen kecuali Lombok Barat mencapai 8,4 persen per tahun.
 - Meskipun porsi PAD secara umum untuk seluruh kabupaten kecil, namun kecenderungannya meningkat hingga tahun 2011, sementara dana perimbangan cenderung menurun.
 - Penyumbang terbesar PAD bervariasi antar kabupaten namun secara umum adalah retribusi daerah dan penerimaan lain PAD yang sah kecuali Lombok Barat dan Lombok Timur (pajak daerah-pajak hotel), Dompu, Merauke (hasil pengelolaan kekayaan daerah), SBD, Keerom, Supiori, TTU (lain-lain PAD-jasa giro dan pendapatan bunga).
- Hasil Analisis Belanja Daerah
 - Secara keseluruhan, belanja daerah meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan daerah yang terjadi pada seluruh kabupaten studi PERA kecuali Peg. Bintang menurun dan Merauke berfluktuasi.
 - Proporsi terbesar terhadap belanja daerah adalah alokasi belanja pegawai hampir seluruh kabupaten kecuali kabupaten studi PERA di Papua (porsi belanja modal lebih besar dari belanja pegawai)
 - Berdasarkan klasifikasi sektor, porsi alokasi belanja cukup besar didominasi oleh dua sektor yaitu sektor pendidikan dan pemerintahan umum, selebihnya sektor strategis lainnya relative kecil.
 - Sebagian kabupaten mengalokasikan belanja dengan porsi yang lebih besar ke sektor pendidikan dan sebagian lainnya lebih besar ke sektor pemerintahan umum. Sedangkan sektor-sektor strategis lainnya relative kecil bahkan sektor pertanian sebagai sektor yang dominan disentuh oleh masyarakat justru memperoleh alokasi belanja terkecil diantara sektor strategis lainnya

Gambaran Umum Hasil/Temuan Analisis PERA di Jawa Timur:

- Kondisi Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)
 - Secara umum, kinerja PKD di Jatim sudah cukup baik

- Kondisi perencanaan & penganggaran juga cukup baik meski harus lebih diperbaiki dari sisi kerangka perundangan mengenai perencanaan & penganggaran
- Kendala umum yang dihadapi oleh PKD dari sisi *oversight & accountability* di Jatim adalah kualitas & kuantitas SDM serta sistem informasi → terutama di Sampang dimana jumlah pengawas di Inspektorat Kabupaten hanya 4 orang
- Perlu dilakukan peningkatan kinerja internal audit terutama dalam hal kecepatan merespon pemeriksaan keuangan dari pihak eksternal ◇ contoh kasus di Trenggalek, dari 382 temuan masih diselesaikan 322, jadi masih ada 52 temuan yang belum diselesaikan ◇ Solusi, peningkatan kualitas melalui pelatihan
- Transparansi PKD harus dipublish secara online, yang sudah tersusun rapi Trenggalek
- Pendapatan Daerah
 - Pendapatan daerah tertinggi adalah Kabupaten Malang, namun karena jumlah penduduk yang sangat besar, pendapatan daerah perkapita Malang menjadi yang terkecil
 - Secara keseluruhan, pendapatan daerah 4 kabupaten masih sangat bergantung pada DAU, kemandirian daerah masih rendah dimana rasio PAD terhadap total pendapatan masih rendah. Rasio PAD tertinggi adalah Kabupaten Malang yang diperoleh dari lain-lain PAD terutama dari pendapatan BLUD
 - Ruang fiskal = Total pendapatan – belanja gaji – belanja bagi hasil dan bantuan keuangan – belanja bukan – DAK
 - Ruang fiskal di 4 kabupaten masih kurang lebar ◇ artinya, dana untuk kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi juga belum terlalu besar
 - DAU yang menjadi sumber pendapatan terbesar paling banyak dialokasikan untuk belanja pegawai tidak langsung
- Belanja Daerah
 - Belanja daerah di 4 kabupaten selalu meningkat seiring peningkatan jumlah pendapatan daerah.
 - Belanja tidak langsung masih mendominasi komponen belanja daerah dimana sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai tidak langsung terutama Trenggalek.
 - Semua kabupaten memberikan prioritas anggarannya untuk sektor pendidikan dan diharapkan mampu meningkatkan IPM masing-masing daerah.

SULAWESI DEVELOPMENT DIAGNOSTIC (SDD): Pengembangan Infrastruktur dan Pertumbuhan Inklusif di Sulawesi

- Kajian Sulawesi Development Diagnostic (SDD) merupakan kerjasama kelembagaan antara Bank Dunia, P3KM UNHAS dan BKPRS.
- Ide bagi Sulawesi adalah *Inclusive Growth* yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat dan memerlukan upaya yang berfokus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia.
- Pulau Sulawesi mencatat pertumbuhan ekonomi paling impresif di Indonesia dalam 10 tahun terakhir yang menyebabkan kontribusinya terhadap PDB Nasional terus membesar. Meskipun menunjukkan penurunan angka kemiskinan, namun elastisitas pertumbuhan-kemiskinan relatif kecil dibanding rata-rata Nasional. Empat dari enam provinsi masih mencatat tingkat kemiskinan di atas rata-rata Nasional. Ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi cenderung meningkat dan bergerak lebih cepat dibanding rata-rata Nasional. Menariknya daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi justru menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang rendah.
- Tantangan bagi Sulawesi adalah menjaga momentum pertumbuhan dan mengupayakannya terus berkelanjutan serta mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif melalui pengembangan infrastruktur untuk pembangunan inklusif, mengoptimalkan dampak pertumbuhan industri ekstraktif dan memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap layanan publik.
- Tujuan dari SDD:
 - Menyelidiki dan memahami lebih jauh faktor-faktor yang mendorong pola pertumbuhan dan pembangunan Sulawesi saat ini
 - Mengidentifikasi kendala dan tantangan bagi upaya perwujudan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan;
 - Menyelidiki sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menyediakan lapangan kerja produktif, mengurangi angka kemiskinan, dan menciptakan pemerataan pendapatan;
 - Mengidentifikasi tindakan yang dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan di masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
- SDD: Menghasilkan 6 Risalah Kebijakan (*Policy-Note*)
 - Apa yang mendorong Sulawesi tumbuh dan kelompok masyarakat mana yang masih tertinggal dalam proses pertumbuhan;
 - Mengembangkan infrastruktur untuk pembangunan inklusif;
 - Mengoptimalkan dampak pertumbuhan industri ekstraktif;
 - Mendorong ekonomi pedesaan Sulawesi untuk memperluas kesempatan kerja di luar sektor pertanian;
 - Mencapai posisi lebih baik dalam rantai nilai produksi pertanian;
 - Memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap layanan publik.
- Temuan Awal Kajian Infrastruktur
 - Penyediaan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan utama pembangunan Pulau Sulawesi pada saat pemerintah daerah mengalami kesenjangan/celah anggaran yang cukup tajam antara kebutuhan dan kemampuan menyediakan anggaran

- Meskipun tingkat kapasitas jalan di Sulawesi masih lebih rendah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan rata-rata Nasional, namun menunjukkan pertumbuhan yang paling akseleratif.
- Sulawesi membelanjakan lebih sedikit proporsi dari anggaran yang dimilikinya untuk infrastruktur dibandingkan daerah lain di Indonesia. Sulawesi juga memiliki belanja infrastruktur per kapita yang lebih kecil daripada pulau lain di Indonesia.
- Akses penduduk Sulawesi kepada jenis infrastruktur utama, termasuk air bersih, listrik, dan sanitasi, lebih rendah secara signifikan daripada di Jawa/Bali, lebih baik daripada Kalimantan dan Indonesia Timur, dan pada kisaran yang sama dengan Sumatera.
- Prioritas sektoral adalah jalan, air bersih dan sanitasi, sedangkan prioritas geografis termasuk investasi infrastruktur dalam yurisdiksi daerah perkotaan yang berkembang pesat dan juga infrastruktur yang menghubungkan daerah pedesaan dan perkotaan.
- Temuan Awal Kajian Industri Ekstraktif
 - Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sulawesi hanya 6,2 persen, dibandingkan dengan 7,7 secara Nasional, memiliki multiplier effect yang rendah akibat terbatasnya kaitan ke depan dan ke belakang.
 - Tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan cukup rendah, ditandai oleh tingkat informalitas yang tinggi tingkat dan tingkat pendidikan yang rendah, serta akses yang terbatas bagi penduduk lokal untuk mencapai posisi yang lebih tinggi.
 - Booming harga nikel antara 2002-2007 dan tata kelola yang lemah mendorong banyaknya pemain baru yang terjun ke pertambangan nikel dan menimbulkan masalah yang kian kompleks.
 - Bagi hasil SDA yang diterima oleh pemerintah Sulawesi, bukan hanya persentasenya relatif kecil tetapi juga trend-nya semakin menurun.
 - Praktek penambangan skala kecil, terutama emas, menimbulkan resiko bagi penambang, masyarakat sekitar, dan lingkungan hidup.

VI. Usulan Rekomendasi

1. Kawasan Timur Indonesia perlu berkontribusi terhadap penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019, baik dari segi struktur dan substansi maupun pendekatan dan cara pandang. Sebagai tindak lanjut adalah akan dilaksanakan pertemuan khusus berupa Workshop Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI untuk mengintegrasikan Isu-Isu strategis pembangunan KTI secara keseluruhan ke dalam Naskah *Background Study* RPJMN 2015-2019 Buku III yang akan dilaksanakan akhir Agustus 2013 di Papua. Workshop ini akan melibatkan Jaringan Peneliti KTI (JiKTI).
2. Kajian Sulawesi Development Diagnostic (SDD) juga perlu mengembangkan sebuah cara pandang yang mengamati peran dan share, baik provinsi maupun pulau besar, terhadap pembangunan nasional. Peluang-peluang untuk mereplikasi kajian Development Diagnostic untuk pulau-pulau besar lainnya di KTI sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut.

3. Peluang untuk melaksanakan kajian Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA) di provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten di KTI yang belum melaksanakan kajian ini perlu untuk dipertimbangkan.
4. Bagi daerah-daerah yang mengalami tantangan tingginya angka malaria, tingginya angka kematian ibu melahirkan dan bayi di wilayah kepulauan, dan pendataan yang tidak akurat, perlu mereplikasi praktik-praktik cerdas Malaria Center, Rumah Tunggu dan Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM) tentunya disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing.

Penutup

Point-point pesan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan BaKTI (Prof. Willi Toisuta) pada penutupan Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI IX:

1. Diskusi Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI sangat *intellectual stimulating* dan *high profile discussions*.
2. Kepala Bappeda Provinsi adalah “Otak” Pemerintah Provinsi dan mereka adalah *entry point* program pembangunan di provinsi.
3. Sebagai kepala BAPPEDA, kita adalah yang paling tahu kondisi dan kebutuhan pembangunan daerah, dan bukan pihak lain. Karena itu kita bertanggung jawab penuh atas keberhasilan pembangunan daerah dan bangsa Indonesia. Karena Indonesia bukan milik orang lain, tapi milik kita, milik beta.